

LAPORAN KINERJA

2024

KEDEPUTIAN
BIDANG BINA
TENAGA DAN
POTENSI



KATA PENGANTAR

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen kinerja merupakan salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah di era reformasi ini. Untuk mewujudkan agenda tersebut, sejak akhir tahun 1999, melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dan diperbaharui melalui Perpres Nomor 29 Tahun 2014, telah diperkenalkan suatu sistem manajemen pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan uang atau dana publik yang dibelanjakannya. Dalam Sistem AKIP, keberhasilan instansi pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan dari keberhasilan menghabiskan anggaran tersebut.

Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi tahun 2024 ini disusun dengan menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro di bidang Pembinaan Potensi. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsinya.

Dari laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pimpinan dalam menentukan strategi dan kebijaksanaan yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi dalam melaksanakan tugas pembinaan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2025
Deputi Bidang Bina Tenaga dan
Potensi,



Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Madya (IV/d)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Umum.....	1
B. Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Aspek Strategis	4
E. Sistematika Laporan.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Umum.....	6
B. Ikhtisar Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024	7
1. Visi	7
2. Misi.....	7
3. Tujuan	7
4. Sasaran.....	8
5. Indikator Kinerja	8
6. Program	10
7. Cascading Kinerja	10
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
1. Umum	16
2. Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....	17
3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022	18
B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	24

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Kedeputian	9
Tabel 2.2. Cascading Kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi.....	13
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2024	14
Tabel 3.4. Keterkaitan Sasaran Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2024.....	15
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	17
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun 2023	18
Tabel 3.3. Realisasi Anggaran Masing-masing indikator kinerja.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kedeputian.....	3
Gambar 2.1. Tujuan dan Sasaran BASARNAS 2020 – 2024.....	8

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tuntutan masyarakat makin meningkat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam upaya mewujudkan *Good Governance*. Salah satu perwujudan *Good Governance* adalah hasil pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 sebagaimana diperkuat dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menentukan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang merupakan bagian dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan potensi, serta membina dan mengkoordinasikan kesiapan potensi pencarian dan pertolongan sesuai dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 03 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan harapan semua pihak. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil. SAKIP merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Untuk menerapkan SAKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*), Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*). Hasil penerapan SAKIP dilaporkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). LAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kedeputian untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena hal tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Kedeputian Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**1. Kedudukan**

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Deputi.

2. Tugas

Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta bimbingan dan penyuluhan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan.

3. Fungsi

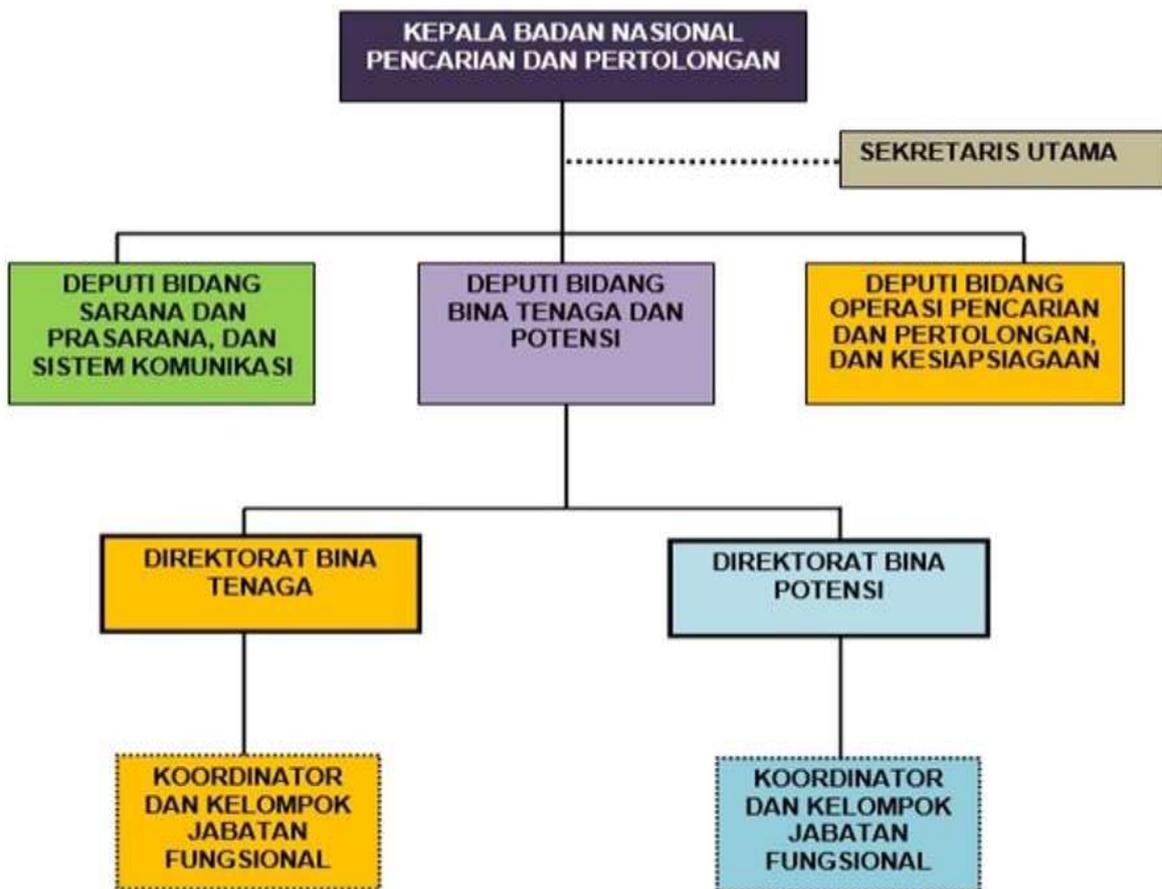
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- d. koordinasi pelaksanaan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- e. pemantauan, penilaian, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan;
- f. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang potensi pencarian dan pertolongan;

- g. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

c. Struktur Organisasi

Sebagai unit kerja tingkat eselon I, Deputi Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan membawahi 2 Direktorat setingkat eselon II, yaitu Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi. Masing-masing unit kerja eselon II membawahi beberapa kelompok jabatan fungsional tertentu. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan

D. Aspek Strategis

Pembangunan manusia merupakan salah satu pilar pembangunan Indonesia hingga tahun 2045. Sumber daya manusia (SDM) sebagai subyek pembangunan berperan penting dalam menentukan kemajuan. Pembangunan sumber daya manusia di lingkungan instansi pemerintah diharapkan dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan andal.

SDM pencarian dan pertolongan merupakan isu strategis renstra Kedepuitian Bidang Bina Tenaga dan Potensi. Sumber daya manusia tersebut berkaitan dengan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan. Tenaga dan potensi merupakan komponen penting dalam menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Sebagai faktor krusial, maka perlu dilaksanakan peningkatan kualitas tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, melalui:

1. standarisasi tenaga dan potensi sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. peningkatan capaian target sertifikasi tenaga SAR dan potensi SAR;
3. Keterlibatan potensi SAR dalam bimbingan teknis dan uji kompetensi pencarian dan pertolongan;
4. program pembinaan rutin tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan; dan
5. peran serta masyarakat melalui program pelibatan aktif masyarakat.

Tindak lanjut hal tersebut, maka dirumuskan aspek strategis pembangunan SDM pencarian dan pertolongan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan pembinaan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan melalui peningkatan fungsi pembinaan yang meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan:
 - a. meningkatkan jumlah norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - b. memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan yang telah ditetapkan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan

- c. meningkatkan jumlah pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, serta penyempurnaan terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan peran serta masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pencarian dan pertolongan, yaitu “meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan pencarian dan pertolongan”.
3. Kebijakan sumber daya manusia melalui penguatan sumber daya manusia tenaga pencarian dan pertolongan yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi, yaitu “penyusunan standar kompetensi petugas pencarian dan pertolongan”.

E. Sistematika Laporan

Sistematika laporan kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan memuat kondisi umum, tugas, fungsi, struktur organisasi, penekanan pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama/*strategic issue* yang sedang dihadapi.
2. Bab II Perencanaan Strategis memuat peta strategis, ikhtisar Renstra Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi, *Cascading* Kinerja mulai dari sasaran strategis hingga sasaran kegiatan, perjanjian kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi serta keterkaitan sasaran program dengan kegiatan termasuk penganggarannya.
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:
 - a. Capaian kinerja organisasi, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi dari setiap kinerja sasaran program Kedeputian sesuai hasil pengukuran kinerja Kedeputian.
 - b. Realisasi anggaran, pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja.
4. Bab IV Penutup memuat simpulan umum atas capaian kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi serta Langkah masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI

A. Umum

Rencana Strategis (Renstra) Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi adalah pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi kedeputian dalam mendukung tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Renstra disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 hingga 2024 yang berisi 1) kondisi umum, potensi dan permasalahan; 2) visi, misi, dan tujuan; 3) arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; 4) target kinerja dan kerangka pendanaan.

Sejak diterbitkan tahun 2020, Renstra Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi mengalami tantangan baik internal maupun eksternal. Secara internal, sebagai unit kerja pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi tidak terlepas dari perubahan kebijakan dan sistem penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah selama tahun 2020-2021. Tahun tersebut merupakan tahun dengan kondisi khusus karena adanya pandemi COVID-19 yang menimbulkan dampak signifikan pada semua sektor. Selain itu juga banyak peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berdampak pada target pembangunan, struktur kelembagaan, dan pola tata kelola organisasi, maupun tata hubungan dengan *stakeholder* terkait.

Dari sisi eksternal, pembinaan tenaga dan potensi dipengaruhi oleh faktor-faktor luar organisasi seperti berkembangnya kesepakatan internasional bidang pembinaan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan, perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi keselamatan transportasi dan potensi bencana alam, perubahan kondisi sosial masyarakat, tuntutan yang makin tinggi terhadap kinerja penyelenggaraan layanan publik termasuk layanan publik bidang pembinaan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan.

Berkaitan dengan perubahan internal dan eksternal tersebut, maka perlu dilakukan reviu terhadap renstra Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2020-2024. Reviu renstra Kedeputian juga dilakukan pada tataran sasaran dan indikator kinerja utama Kedeputian. Meskipun demikian penyesuaian indikator kinerja tidak

merubah indikator kinerja utama lembaga (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).

B. Ikhtisar Reviu Rencana Strategis Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2020 - 2024

1. Visi

Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pencarian dan Pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang Kompeten dan tersertifikasi dalam Mendukung Pencapaian Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan”.

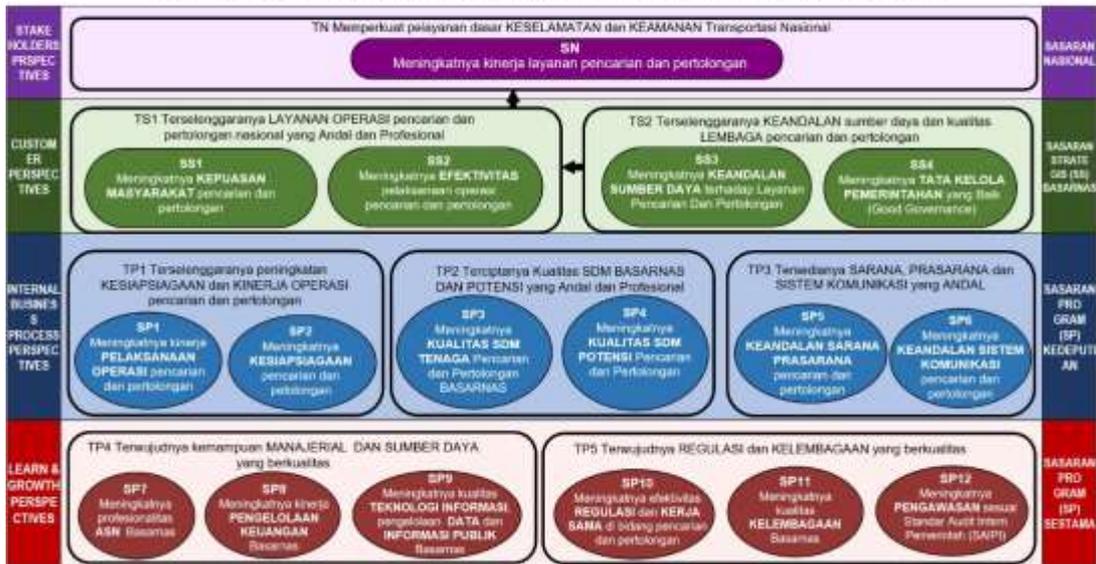
2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas tenaga pencarian dan pertolongan untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.
- b. Meningkatkan kompetensi potensi pencarian dan pertolongan untuk mendukung keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi. Rumusan tujuan Kedeputian dilakukan dengan pendekatan *balance scorecard* (BSC). Metode BSC menganalisis tujuan dari 4 (empat) perspektif yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business proces perspective*, dan *learn and growth perspective*. Berikut disampaikan peta strategis mengacu pada 4 perspektif tersebut:

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024



Gambar 2.1. Tujuan dan Sasaran BASARNAS 2020 – 2024

Berdasarkan analisis BSC maka tujuan Kedepuitan dilihat dari perspektif *Internal business process*, sebagai berikut:

- Terewujudnya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang andal dan profesional.

4. Sasaran

Sasaran Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi memperhatikan sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berdasarkan peta strategis Basarnas, maka pada level *Internal business process perspective*, sasaran Kedepuitan adalah:

- Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS; dan
- Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan.

5. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) merupakan sarana untuk mengukur capaian sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan indikator kinerja memperhatikan sasaran dan tujuan. Berikut disampaikan *cascading* tujuan hingga IKSP Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi:

PROGRAM							
Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana							
TUJUAN PROGRAM (TP)	SASARAN PROGRAM (SP)	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (IKSP)	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terciptanya SDM Basarnas dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	78%	80%	85%	93%	95%
	Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	100 %	100%	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	82	83	84	88	89

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi 2020 – 2024

6. Program

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Kedeputian, maka Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan melaksanakan 1 (satu) program teknis yaitu Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana.

7. *Cascading* Kinerja

Cascading kinerja Kedeputian dapat dilihat dari program hingga kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja pada Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi. Kegiatan pokok tiap unit kerja menghasilkan *output* sesuai bidang tugas, sebagai berikut:

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

a. Direktorat Bina Tenaga, dengan sasaran kegiatan pokok sebagai berikut:

- 1) Layanan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan tenaga; dan
- 2) Layanan pembinaan tenaga, sertifikasi, dan jabatan fungsional

b. Direktorat Bina Potensi

- 1) Layanan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan potensi; dan
- 2) Layanan pembinaan potensi, sertifikasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Cascading sasaran dan indikator disusun berjenjang mulai dari sasaran dan indikator tingkat eselon 1 hingga sasaran dan indikator tingkat eselon II dibawahnya. *Cascading* sasaran dan indikator Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI TAHUN 2024

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi	Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi dan pengelolaan jabatan fungsional.	Persentase Tenaga Pencarian dan Pertolongan yang terbina	Direktur Bina Tenaga
				Persentase Petugas Pencarian dan Pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi	
				Indeks kepuasan layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Teknis Pencarian dan Pertolongan	
			Terwujudnya peningkatan pengembangan dan standardisasi tenaga teknis pencarian dan pertolongan	Persentase norma, standar, prosedur dan kriteria tenaga yang ditetapkan	
				Persentase dokumen rencana, pengembangan dan evaluasi Tenaga Pencarian dan Pertolongan yang disahkan	

LAPORAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI TAHUN 2024

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi	Meningkatnya kualitas Norma, Standar, Kriteria, dan Prosedur Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	Persentase NSPK Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang tersusun	Direktur Bina Potensi
			Meningkatnya jumlah masyarakat yang antusias terhadap keselamatan diri	Tingkat Partisipasi Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	
			Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan	Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan	

LAPORAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI TAHUN 2024

PROGRAM			KEGIATAN		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan		operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	

Tabel 2.2. Cascading Kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi

C. Perjanjian Kinerja

1. Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja pelaksanaan tugas yang tertuang dalam penetapan. Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu. Penetapan kinerja mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, dan transparansi kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah. Penetapan kinerja juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Berikut Sasaran dan Indikator Kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2024.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	95%
2	Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	135%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	88,5

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2024

2. Keterkaitan Sasaran Program, Kegiatan, dan Anggaran

Perumusan *performance-based budgeting* memperhatikan rincian sasaran program, indikator kinerja, dan aktivitas yang dilakukan di level eselon 2 sampai jenjang di bawahnya. Keterkaitan sasaran program, indikator kinerja, dan anggaran Ke deputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	TOTAL PAGU REVISI
1.	Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	95%	41.237.708.000
2.	Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	135%	Rp. 7.848.035.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	88,5	

Tabel 2.4. Keterkaitan Sasaran Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

NO.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kompetensi SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Persentase peningkatan jumlah Petugas Pencarian dan Pertolongan dan Anak Buah Kapal (ABK) yang kompeten	95%
2.	Meningkatnya kompetensi SDM potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase keterlibatan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan	100%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelatihan potensi Pencarian dan Pertolongan	89 %

Pagu Anggaran

: Rp 55.592.066.000,-

Jakarta, Januari 2024

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan,

Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi,



Kusworo, S.E.,M.M.
Marsekal Madya TNI



Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Madya (IV/d)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Umum

Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja yang berorientasi pada hasil (*result oriented*). Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada hasil akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.

Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan adanya informasi mengenai hasil-hasil yang diperoleh. Hasil-hasil yang diperoleh tersebut kinerjanya harus diukur sampai sejauh mana pencapaiannya melalui pengukuran kinerja. Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja dalam program Kedeputan Bidang Bina Tenaga dan Potensi.

Dalam penilaian pencapaian kinerja Kedeputan Bidang Bina Tenaga dan Potensi dilakukan pengelompokan kategori, yaitu:

Penilaian Pencapaian Kinerja

No.	Kategori	Nilai Angka (%)	Interprestasi
1.	A	86 – 100	Sangat Baik
2.	B	66 – 85	Baik
3.	C	51 – 65	Cukup
4.	D	0 – 50	Kurang

Secara garis besar capaian kinerja Kedeputan Bidang Bina Tenaga dan Potensi dapat dikatakan sangat baik dengan kategori A dan sudah memenuhi target capaian kinerja, yaitu dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 100%.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai prosentase nilai capaian kinerja yang cukup baik. Hasil evaluasi kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan BASARNAS	Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	95%	95,5%	101,5%
Meningkatnya kualitas SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan	Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	135%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	89	89	88,5

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

3. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2023		2024	
	%			
Persentase peningkatan jumlah petugas pencarian dan pertolongan dan anak buah kapal yang kompeten diubah menjadi Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	93%	93%	95%	95,5%
Persentase keterlibatan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan diubah menjadi Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	135%
Persentase pemahaman SDM Potensi tentang Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	Penyesuaian indikator kinerja	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	88	88	89	88,5

Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 -2024

LAPORAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI TAHUN 2024

KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI																
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	CK	T	R	CK	T	R	CK	T	R	CK	T	R	CK
SP.3 Meningkatnya kualitas SDM Tenaga Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKSP.3.1 Persentase peningkatan pembinaan tenaga, sertifikasi, dan pengelolaan jabatan fungsional	100	100	100	100	100	100	85	85	100	93	93	100	95	95,5	101,5%
SP.4 Meningkatnya kualitas SDM potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSP.4.1 Persentase kenaikan jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan	100	100	100	100	100	100	100	99,5	99,5	100	130	130	100	135	135%
	IKSP.4.2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat Pencarian dan Pertolongan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	88	88	100	89	88,5	100%

Tabel 3.2A. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 -2024

1) PENJELASAN SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS SDM TENAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Indikator: Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional

- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
 - 1) Jumlah tenaga pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi melalui uji kompetensi profesi terlaksana sesuai target dengan pendekatan bertahap dan pembinaan yang berkesinambungan sebelum melaksanakan uji kompetensi;
 - 2) Kemampuan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan yang terbina sehingga dapat mencapai target sertifikasi.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - penyusunan materi uji dan evaluasi serta penyelenggaraan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional yang mencakup seluruh jenjang jabatan;
 - Pelaksanaan kegiatan sertifikasi K3 yang efektif dan efisien;
 - Pengelolaan program pembinaan tenaga Pencarian dan Pertolongan berupa uji periodik tenaga SAR guna meningkatkan kinerja tenaga pencarian dan pertolongan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 - Pembinaan Kompetensi Tenaga Medis sesuai dengan target kompetensi dan jumlah lulusan;
 - Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Keterampilan Awak Kapal sesuai dengan target kompetensi dan kelulusan peserta;
 - Uji Periodik Tenaga SAR terlaksana sesuai tujuan program;
 - Training for Crew Helicopter terlaksana dengan efektif;
 - Penyediaan Jasa Pengawakan Kapal SAR dapat terselesaikan;

- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Pencarian dan Pertolongan terselesaikan dengan efektif;
- Pembinaan Awak Sarana Udara melalui Simulator;
- Pemeliharaan Kompetensi Awak Drone
- Pengelolaan Sertifikasi Tenaga Pencarian dan Pertolongan;
- Uji Kompetensi Pranata Pencarian dan Pertolongan;
- Uji Kompetensi Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan;
- Sertifikasi K3;
- Sertifikasi ARO;
- Forum Koordinasi Jabatan Fungsional Seluruh Indonesia;
- Prototype Persiapan Uji Kompetensi melalui Aplikasi Micro Learning;
- Penyusunan Petunjuk Teknis Pemeliharaan Kompetensi SDM Kesehatan;
- Penyusunan Petunjuk Teknis Pemeliharaan Kompetensi Awak Sarana Air.
- Penyusunan Juknis Uji Periodik Tenaga.

2) PENJELASAN SASARAN 2: MENINGKATNYA KUALITAS SDM POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Indikator: Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan

Meningkatnya peran serta SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan didukung oleh Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan. Hal ini menggambarkan bahwa Potensi sangat mendukung kegiatan pembinaan pelatihan yang dilakukan oleh Bina Potensi dan mendukung kegiatan Operasi sehingga Indikator Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan menjadi meningkat dikarenakan antusias Potensi dalam peibatan operasi SAR

Di beberapa Lokasi seperti Surabaya, Semarang, Jogja, Solo mempunyai potensi portensi yang sangat militant terhadap tugas tugas kemanusiaan yang dilakukan oleh BASARNAS

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah untuk pembinaan potensi pencarian dan pertolongan dalam setiap operasi pencarian dan pertolongan yang diselenggarakan pada tahun 2024. Indikator ini diwujudkan untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;

Indikator kinerja ini melampaui target disebabkan peran partisipasi Masyarakat terhadap dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan sangat baik karena BASARNAS telah melakukan penyuluhan pemberdayaan kelompok Masyarakat untuk daerah rawan bencana sebagai Upaya mitigasi bencana. Selain itu Tingkat kesadaran Masyarakat terhadap kemanusiaan yang mengalami bencana semakin tinggi dibuktikan dengan nilai survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan SAR.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output menggunakan input seminimal mungkin.

Dalam melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya, BASARNAS menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat bekerja sendiri melainkan keterkaitan dengan potensi yang ada di wilayah rawan bencana melalui forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pencarian dan pertolongan pengkoordinasian dan dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dapat terlaksana dengan maksimal.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2024 menandakan

telahefektifnya pelaksanaan kegiatan pada 2024 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:

- Penyiapan Dukungan Potensi Pencarian dan Pertolongan
- Penyelenggaraan FKP3 Tingkat Pusat
- Workshop Bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan
- Uji Kompetensi Potensi
- Uji Kompetensi Bidang Pencarian dan Pertolongan (PNBP)

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan

- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan:
Peningkatan hasil IKM ini dikarenakan pelayanan SAR yang dirasakan sangat mudah dan tidak dipungut biaya dalam kegiatan pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan menyebabkan indeks kepuasan Masyarakat meningkat.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Dalam melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya, BASARNAS menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat bekerja sendiri melainkan keterkaitan dengan potensi yang ada di wilayah rawan bencana melalui forum koordinasi potensi pencarian dan pertolongan dan pemberdayaan kelompok masyarakat pencarian dan pertolongan pengkoordinasian dan dukungan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dapat terlaksana dengan maksimal.

LAPORAN KINERJA KEDEPUTIAN BIDANG BINA TENAGA DAN POTENSI TAHUN 2024

Tabel Potensi Terlibat dalam setiap Pelayanan Operasi

NO	UNIT KERJA	JUMLAH POTENSI SAR YANG TERLIBAT OPERASI SAR DI SETIAP BULAN TAHUN 2024																							
		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
		Jum. Orang	Jum. Ops. SAR	Jum. Orang	Jum. Ops. SAR	Jum. Orang	Jum. Ops. SAR	Jum. Orang	Jum. Ops. SAR	Jum. Orang	Jum. Ops. SAR	Jum. Orang	Jum. Ops. SAR	Jum. Orang	Jum. Ops. SAR	Jum. Orang	Jum. Ops. SAR	Jum. Orang	Jum. Ops. SAR	Jum. Orang	Jum. Ops. SAR	Jum. Orang	Jum. Ops. SAR	Jum. Orang	Jum. Ops. SAR
1	Aceh	117	7	38	2	242	11	118	4	141	6	72	3	129	3	222	5	141	8	27	1	166	9	165	10
2	Medan	55	4	152	8	37	4	90	7	69	4	115	7	132	8	240	7	477	15	492	15	496	11	225	8
3	Tanjung Pinang	101	1	86	3	31	2	39	2	206	6	27	1	231	6	99	2	180	5	89	2	70	1	205	5
4	Nias	95	4	75	3	28	2	30	2	85	4	110	3	73	1	65	2	69	3	100	2	225	4	325	5
5	Jambi	234	7	0	0	0	0	9	1	20	3	11	1	37	4	39	3	16	1	NIHIL	NIHIL	74	6	64	2
6	Padang	419	6	175	6	593	10	543	7	857	6	138	4	147	4	359	5	589	5	92	3	452	6	268	4
7	Pekanbaru	22	8	304	7	140	4	101	3	159	6	41	3	205	7	33	1	130	4	236	7	413	12	108	5
8	Mentawai	NIHIL	2	22	3	5	3	NIHIL	NIHIL	7	1	13	2	12	2	NIHIL	1	NIHIL	1	63	3	346	4	96	2
9	Pangkal Pinang	150	3	74	5	260	8	43	1	94	4	58	4	133	7	25	2	14	2	115	4	108	5	23	1
10	Palembang	319	9	32	4	73	7	83	5	213	8	150	9	129	10	90	3	36	3	79	5	91	6	51	3
11	Lampung	274	7	347	8	317	9	140	5	289	8	215	6	166	5	38	1	NIHIL	NIHIL	139	7	247	8	42	2
12	Bengkulu	174	5	115	3	78	4	62	3	47	5	15	2	100	3	40	2	NIHIL	1	85	2	27	1	95	5
13	Natuna	NIHIL	NIHIL	66	3	104	2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	48	3	25	1	83	2	28	1	18	1	NIHIL	NIHIL
14	Banten	80	4	120	6	65	4	13	1	45	1	33	1	24	1	155	6	52	2	79	4	0	0	223	5
15	Jakarta	737	18	311	8	801	11	173	4	743	16	309	7	409	9	29	3	334	8	442	11	486	15	455	15
16	Bandung	506	9	230	10	1006	13	330	9	215	4	174	7	152	6	143	6	107	5	216	12	286	9	124	4
17	Cilacap	432	8	644	13	457	7	112	3	349	6	469	8	154	3	91	2	518	6	213	3	369	11	285	10
18	Yogyakarta	135	4	127	7	94	6	75	4	82	6	85	3	244	5	243	8	159	6	122	5	98	4	471	12
19	Surabaya	971	15	548	9	659	14	701	16	300	10	604	9	303	7	385	10	479	9	275	8	366	8	1.410	23
20	Semarang	616	15	1180	24	787	21	510	17	330	11	233	10	445	11	248	8	194	7	159	9	268	11	823	19
21	Pontianak	203	8	103	5	234	8	167	5	221	9	165	5	176	6	263	10	293	7	295	8	166	5	301	12
22	Palangka Raya	237	9	32	4	251	11	34	3	147	7	118	8	134	8	32	2	52	4	73	4	35	3	42	5
23	Banjarmasin	326	13	312	7	115	4	203	9	190	5	184	5	16	1	138	4	48	2	250	6	121	5	166	7
24	Balikpapan	410	3	461	5	735	9	352	2	490	3	1087	7	450	6	503	9	361	5	949	9	240	4	815	8
25	Tarakan	13	1	30	1	173	1	NIHIL	NIHIL	35	1	113	1	72	1	NIHIL	NIHIL	20	1	22	1	25	1	35	2
26	Mataram	16	3	5	1	6	1	80	4	45	2	55	4	35	4	49	6	34	4	46	7	16	2	40	8
27	Kupang	NIHIL	1	3	4	60	4	39	3	19	2	37	3	27	1	NIHIL	NIHIL	20	1	68	4	NIHIL	NIHIL		
28	Maumere	191	2	33	4	39	5	75	7	63	4	50	6	9	2	50	4	85	7	109	4	268	2	6	2
29	Denpasar	36	2	133	9	177	5	85	7	192	8	120	8	113	4	468	10	194	5	87	5	117	5	168	8
30	Makassar	186	8	509	9	143	5	320	9	748	11	148	7	49	4	91	4	69	8	53	3	211	8	326	7
31	Mamuju	30	2	22	3	10	2	8	2	2	1	20	3	46	5	NIHIL	NIHIL	12	2	49	8	84	5	20	3
32	Kendari	53	7	46	5	191	8	9	2	117	7	166	5	150	11	98	6	83	5	140	7	225	5	44	3
33	Palu	26	4	138	7	39	4	61	4	87	5	251	8	53	9	45	6	20	3	15	2	71	6	57	6
34	Ambon	119	10	38	4	170	8	37	6	30	5	113	6	67	4	23	2	79	7	148	7	145	6	83	5
35	Ternate	214	7	169	2	11	1	23	2	196	3	119	5	112	3	977	3	1050	5	156	2	50	2	270	8
36	Sorong	5	1	65	3	80	4	5	1	3	1	21	1	30	3	33	2	87	4	NIHIL	NIHIL	19	2	54	4
37	Manokwari	32	3	0	1	4	1	130	3	34	2	18	2	17	2	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	20	2	22	2
38	Timika	2	2	135	4	1	1	18	2	2	15	71	4	173	4	15	1	8	2	5	2	2	1	3	1
39	Biak	21	1	5	1	30	4	20	2	5	1	6	1	10	1	5	2	20	2	4	1	10	2	11	2
40	Gorontalo	50	3	2	2	NIHIL	NIHIL	99	3	36	3	110	5	1132	11	26	3	NIHIL	NIHIL	34	6	10	1	73	6
41	Manado	294	5	65	5	153	7	122	1	69	5	150	6	30	8	35	4	25	9	20	3	10	3	160	8
42	Jayapura	13	1	48	4	95	4	56	2	NIHIL	NIHIL	24	1	22	1	20	1	20	3	NIHIL	NIHIL	20	2	6	1
43	Merauke	17	1	65	5	16	1	6	1	213	3	NIHIL	NIHIL	1	5	3	47	10	1	5	1	NIHIL	NIHIL	38	4
	TOTAL	7926	232	7065	224	8510	240	5116	174	7195	218	6018	191	6197	209	5443	204	6168	180	5579	194	6452	202	8198	252
KETERANGAN																									
Persentase		38%		34%		41%		24%		34%		29%		34%		28%		33,20%		30,37%		34,68%		16,55%	
Jumlah Presentase				37%						29%				67%		31,76%			98%			36,34%		134,60%	



- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:
Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2024 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan pada 2024 dan anggaran yang menunjang kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah Pengelolaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan yang diselenggarakan di triwulan I - IV tahun anggaran 2024

Kegiatan Pendukung Sasaran 2 Deputi Bina Tenaga dan Potensi

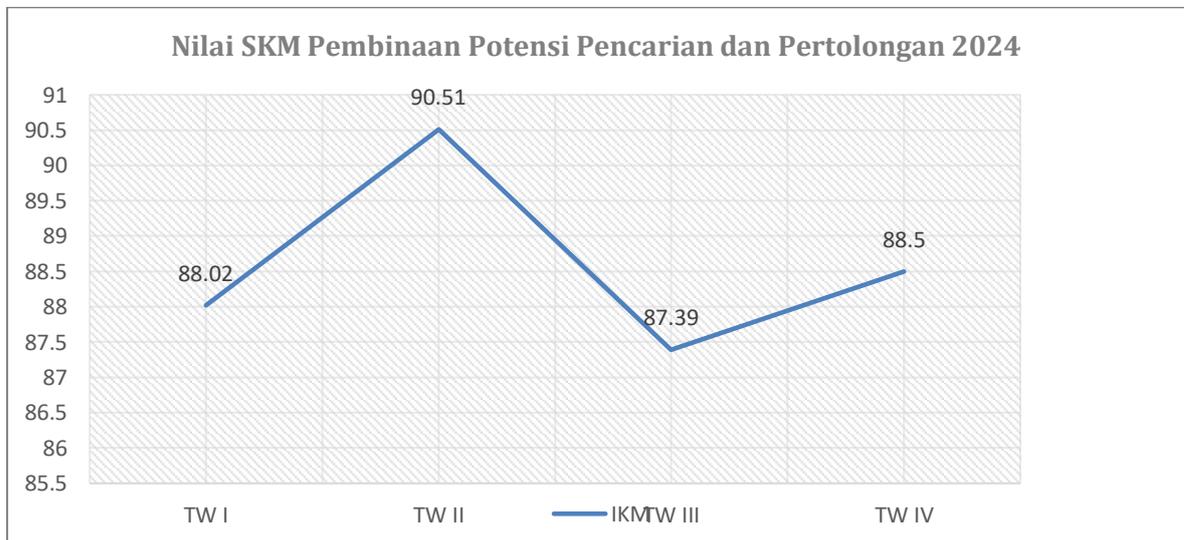
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS (POK)	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas SDM Potensi dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	Pengelolaan Survei Kepuasan Layanan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	1 kegiatan	1 kegiatan
		Penyelenggaraan FKP3 Tingkat Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan
		Penyelenggaraan FKP3 Tingkat Pusat	2 kegiatan	2 kegiatan
		Workshop Bidang Potensi Pencarian dan Pertolongan	2 kegiatan	2 kegiatan
		Uji Kompetensi Potensi	9 kegiatan	25 kegiatan
		Uji Kopenensi Bidang Pencarian dan Pertolongan (PNBP)	1 kegiatan	2
		Refresh Materi Uji Kompetensi	1 kegiatan	1 kegiatan
	Pemeliharaan Kompetensi	1 kegiatan	1 kegiatan	
	Persentase kenaikan jumlah Potensi yang terlibat dalam operasi Pencarian dan Pertolongan	Penyiapan Dukungan Pelibatan Potensi	4 kegiatan	4 kegiatan
		Pengelolaan Sistem Informasi Bina Potensi	1 kegiatan	1 kegiatan
kegiatan pendukung Sasaran 2 didukung oleh kegiatan kegiatan sbb			Target	Realisasi
Penyusunan Petunjuk Teknis Pemberdayaan Masyarakat bidang Pencarian dan Pertolongan			1 Juknis	1 Juknis
Penyusunan Pedoman Sistem Informasi Bina Potensi			1 Juknis	1 Juknis
Pemantauan Pemeliharaan Kompetensi Potensi Pencarian dan Pertolongan			3 kegiatan	3 kegiatan
Pencetakan Buku SAR Goes to School TK/SD SMP SMA			2000 bk	2000 bk
Program SAR Goes to School			1 kelompok	15
Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan			8 kelompok	8 kelompok

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan indeks tingkat kesadaran masyarakat akan pencarian dan pertolongan dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan pembinaan potensi. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah

- ✓ Masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan penilaian kinerja Kedepuitan Bina Tenaga dan Potensi;
- ✓ Mendorong Kedepuitan Bina Tenaga dan Potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- ✓ Mengukur tingkat kepuasan dan kesadaran masyarakat akan pencarian dan pertolongan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 yang dapat disampaikan yaitu:

- ✓ hasil reuiu Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Kedepuitan Bina Tenaga dan Potensi Sesuai dengan Permenpan RB No.14 Tahun 2017;
- ✓ Dalam penyusunan kuesioner survei, nilai unsur tidak boleh berubah, namun untuk pertanyaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan;
- ✓ Survei dilakukan untuk masing-masing jenis layanan, dengan memperhatikan standar pelayanan;
- ✓ Pelaporan SKM sebaiknya dilaksanakan secara berkala 4 kali dalam 1 tahun



Gambar 3.1. Nilai SKM Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi, melalui Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi pada tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan pendanaan APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan total anggaran masing-masing **Rp 41.237.708.000** untuk Direktorat Bina Tenaga dan **Rp. 7.592.755.705** untuk Direktorat Bina Potensi

Berikut persentase realisasi anggaran masing-masing per indikator yang ada di Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi. Hal tersebut secara keseluruhan menggambarkan daya serap anggaran telah tercapai untuk Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi.

INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	2024		
Persentase Peningkatan Pembinaan, Sertifikasi, dan Penilaian Tenaga dan Pengelolaan Jabatan Fungsional	41.237.708.000	40,455,366,000	98%
Persentase Kenaikan Jumlah Potensi yang terlibat dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pencarian dan Pertolongan	7.848.035.000	7.592.755.705	97%

Tabel 3.3. Realisasi Anggaran masing-masing indikator kinerja di Kedepuitan Bidang Bina Tenaga dan Potensi Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja instansi pemerintah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan khususnya unit kerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi tahun 2024 ini merupakan hasil pelaksanaan program kegiatan yang memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi. Hal tersebut menggambarkan capaian target secara keseluruhan dapat terlaksana dengan hasil yang sangat baik.

Tersusunnya laporan akuntabilitas ini disadari belum sempurna, untuk mewujudkan pencapaian dan peningkatan kinerja Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi akan melakukan penyempurnaan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku agar mencapai hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Tahun 2024 yang telah tersusun ini diharapkan dapat memperlihatkan pelaksanaan kinerjanya dan mendorong adanya peningkatan kinerja yang dapat diimplementasikan pada program kerja berikutnya.



LAMPIRAN

